

Kewirausahaan Pancasila: Suatu Tinjauan Kebijakan Ekonomi Pemerintah, Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri, dan Orientasi Pendidikan Kewirausahaan Pancasila

Wahju Wibowo

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

Email: winganti@yahoo.co.id

Abstract: *The low rate of economic growth have an impact on rising unemployment. One alternative solution to cultivate people's economy has proved resilient to the economic crisis through economic Pancasila. Economy can be developed through entrepreneurship Pancasila Pancasila as diapandang more in keeping with the character and socio-cultural values of the community that developed in Indonesia, because the current value of these values already exist in the community and contained in the values of Pancasila. Pancasila so Entrepreneurship is seen as more relevant and closer to the people. Pancasila entrepreneurship can be developed through entrepreneurial economy Pancasila education at all levels of education, both formal and non formal education through community empowerment. Pancasila is expected entrepreneurship and government policies in the field of integrated economy will be able to encourage people to want and more intensive economic activities that can foster independent democratic economy. Entrepreneurship development Pancasila in the form of an independent economic populist, in accordance with the character of the society to encourage the opening of new jobs and could create employment and reduce unemployment. In turn, will be able to move the economy and increasing the per capita income of the people.*

Keywords: *Entrepreneurship Pancasila, Government Economic Policies, Economic and Entrepreneurship Education Pancasila Democracy*

Abstrak: Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi berdampak pada naiknya pengangguran. Salah satu solusi alternatifnya dengan menumbuhkan kembangkan ekonomi kerakyatan yang sudah terbukti tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi melalui ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila dapat dikembangkan melalui kewirausahaan pancasila karena diapandang lebih sesuai dengan karakter dan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia, karena saat ini nilai nilai tersebut sudah ada dalam masyarakat dan tertuang dalam nilai-nilai butir Pancasila. Sehingga Kewirausahaan Pancasila dipandang lebih relevan dan lebih dekat dengan masyarakat. Kewirausahaan Pancasila bisa dikembangkan melalui pendidikan ekonomi kewirausahaan Pancasila pada semua tingkatan pendidikan baik formal maupun non formal melalui pemberdayaan masyarakat. Di harapkan kewirausahaan Pancasila dan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi secara terintegrasi akan bisa mendorong masyarakat untuk mau dan lebih intensif melakukan kegiatan ekonomi yang bisa menumbuhkan ekonomi kerakyatan yang mandiri. Berkembangnya Kewirausahaan Pancasila dalam bentuk ekonomi kerakyatan yang mandiri, sesuai dengan karakter lingkungan masyarakat mendorong terbukanya lapangan kerja baru dan bisa menyerap tenaga kerja dan bisa mengurangi pengangguran. Pada gilirannya akan mampu menggerakkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.

Kata Kunci: Kewirausahaan Pancasila, Kebijakan Ekonomi Pemerintah, Ekonomi Kerakyatan dan Pendidikan Kewirausahaan Pancasila

Kurun waktu tahun 2014 perekonomian Indonesia terus mengalami penurunan dan pada Tahun 2015 terus mengalami pelambatan. Hal tersebut berdampak pada beberapa perusahaan mulai melakukan PHK yang berdampak pada tingginya tingkat pengangguran. melihat dari hal tersebut artinya bahwa perekonomian

Indonesia dibangun oleh usaha-usaha besar yang rentan akan krisis karena modal yang digunakan adalah modal pinjaman dimana akan mudah terpengaruh oleh berbagai kebijakan atau sentiment pasar yang berdampak pada naik turunnya suku bunga bank serta kurs rupiah terhadap dollar AS. Dalam selang waktu yang

tidak terlalu lama pemerintah telah mengeluarkan dua kebijakan ekonomi yang bertujuan menggerakkan dan meningkatkan perekonomian negara yang sedang lesu. Salah satu sasaran kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah mendorong pertumbuhan wirausaha baru juga mendorong usaha yang ada untuk berkembang lebih pesat lagi dengan memberi pinjaman dengan bunga rendah pada kredit usaha rakyat (KUR) yang diharapkan bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan sehingga perekonomian bisa tumbuh dan berkembang. Namun kebijakan tersebut tidak diimbangi dengan pendidikan ekonomi kerakyatan dalam hal ini pendidikan kewirausahaan sebelumnya, sehingga masyarakat tahu harus bagaimana mengelola dan memanfaatkan, kemudahan kebijakan yang diberikan pemerintah, sehingga akan mengurangi pengangguran karena PHK.

Kebijakan yang ada saat ini terkesan dipaksakan dimana masyarakat/pengangguran PHK biasanya tanpa memiliki keahlian tertentu, dipaksa melakukan usaha dengan disodori kebijakan bunga murah tanpa melalui pendidikan atau pelatihan. Kebijakan tersebut bagus bagi masyarakat /pengangguran yang sudah mempunyai keahlian karena akan bisa segera mengembangkan usahanya untuk berdiri dan berkembang. Namun bagi masyarakat/pengangguran karena PHK banyak yang tidak memiliki keahlian tertentu saat di PHK. Karena selama ini mereka bekerja di pabrik yang sifat pekerjaannya monoton atau bidang tertentu saja tanpa memiliki keahlian yang lain. Sehingga akan menyulitkan diri ketika tiba-tiba harus beralih profesi pada bidang lain yang memerlukan kelincahan dalam melakukan berbagai manuver (kreatif dan inovatif) dalam menjalankan usaha dan terkesan sulit berusaha serta kurang tangguh. Bagi masyarakat pengangguran/PHK yang kurang atau tidak memiliki keahlian tertentu, modal usaha pinjaman dalam bentuk (KUR) yang diperoleh tersebut tidak bisa atau sulit berkembang yang pada gilirannya akan menyebabkan kredit macet dalam jumlah besar yang tentunya akan membebani pemerintah. Pertumbuhan ekonomi

yang diharapkan pemerintah bisa tumbuh dengan pesat, malah akan menjadi beban dengan besarnya kredit macet tersebut.

Melihat hal tersebut diatas, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat sudah saatnya pemerintah memberdayakan ekonomi kerakyatan yang terbukti mampu bertahan dari terjangan krisis ekonomi. Melirik kebijakan yang dilakukan oleh negara tetangga Singapura, dimana tingkat pertumbuhan ekonominya pada tahun 2013 PDB nya mencapai 4,1 % dan pada tahun 2014 akan melambat 3,0 % pada tahun ini karena kemerosotan ekonomi global yang memukul perekonomian perdagangannya dan mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi tahun 1998, karena didukung dengan tumbuh berkembangnya usaha-usaha kecil yang dikembangkan melalui kewirausahaan dan pendidikan kewirausahaan yang dikenalkan sejak dini pada warga negara Singapura. Oleh sebab itu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipandang perlu adanya pendidikan kewirausahaan yang menyeluruh di semua bidang dan tingkatan pendidikan guna menjamin kontinuitas atau keberlanjutannya. Karena saat ini kewirausahaan hanya diberikan di perguruan tinggi dan SMK itupun tidak semua jurusan atau program Studi di perguruan tinggi memasukkannya dalam kurikulumnya, dan masih dipandang tidak perlu atau belum perlu dimasukkan dalam kurikulum yang ada.

Uraian diatas memberikan gambaran bahwa sampai dengan saat ini pertumbuhan ekonomi yang didukung ekonomi kerakyatan melalui kewirausahaan di Indonesia masih sangat rendah, sehingga belum mampu menopang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan namun sudah mampu bertahan dari terpaan beberapa kali krisis.

Melihat hal tersebut dipandang perlu dilakukan reorientasi pendidikan kewirausahaan mulai tingkat Pendidikan Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), sampai Perguruan Tinggi (PT). Reorientasi pendidikan kewirausahaan yang dimaksudkan disini adalah kewirausahaan yang

berdasarkan kearifan lokal dan sesuai dengan sosial, budaya dan karakter masyarakat Indonesia, dan tidak akan timbul usaha dimana yang kuat menekan usaha yang lemah. Oleh karena itu kewirausahaan yang ada perlu dilakukan integrasi dengan kondisi sosial,

budaya dan karakter masyarakat Indonesia yang tercermin dalam butir-butir Pancasila yang telah dirumuskan kembali melalui Ketetapan Sidang Istimewa MPR No. XVIII/MPR/1998.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi diperlukan agar kehidupan manusia menjadi lebih baik. Negara sangat berkepentingan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya karena pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan kemajuan di bidang kesehatan dan gizi yang akan meningkat pula, sehingga menyebabkan usia harapan hidup manusia akan semakin panjang serta mampu melakukan investasi yang terkait dengan perbaikan lingkungan. Pada tahun 2010, indeks pembangunan manusia Indonesia menduduki urutan keenam di ASEAN; hanya unggul dari Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar (Kompas, 19 oktober 2011) dalam Kodrat, 2015:5)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dimasa lalu pernah menyentuh -13,13%, namun perekonomian Indonesia sejak tahun 2000 terus mencatat pertumbuhan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5%. Hal ini memunculkan warga kelas menengah baru sekitar 9 juta warga setiap tahun. Bank Dunia menyebutkan 56,5% dari 237 juta populasi penduduk di Indonesia termasuk dalam kategori kelas menengah (kategori kelas menengah versi Bank Dunia adalah mereka yang membelanjakan uangnya US\$ 2 sampai US\$ 20 setiap harinya). Hal tersebut berarti bahwa sampai saat ini terdapat sekitar 134 juta warga kelas menengah di Indonesia (Kompas, 19 Desember 2011) dalam Kodrat, 2015:6).

134 juta warga kelas menengah di Indonesia merupakan warga di usia produktif dan itu sangat riskan akan berbagai perilaku negatif kriminalitas (Minum-minuman keras,

mencuri, merampok, rek-trekan, dll) apabila di usia produktif mereka menganggur dan sebenarnya mereka merupakan asset bangsa dan juga keunggulan bangsa Indonesia.

David Ricardo menjelaskan bahwa sekalipun suatu negara yang tidak memiliki keunggulan absolutpun masih bisa dan tetap memiliki manfaat dari perdagangan internasional. Keunggulan ini diperoleh dengan berkonsentrasi pada usaha terkecil untuk memproduksi suatu barang sehingga masing-masing negara akan memperoleh keunggulan komparatif yang lebih besar. Ricardo menjelaskan bahwa keunggulan komparatif timbul dari perbedaan produktivitas tenaga kerja. Perbedaan ini terdiri dari perbedaan faktor produksi (modal dan tenaga kerja) yang dimiliki suatu negara (mungkin saja teknologi yang digunakan sama, tetapi metode produksinya berbeda). Artinya, jika suatu negara memiliki faktor produksi berlebih, maka biaya produksinya akan semakin rendah. Oleh karena itu, perbedaan dalam faktor *endowments* dari berbagai negara dapat menjelaskan perbedaan faktor biaya yang mengakibatkan keunggulan komparatif yang berbeda (Kodrat, 2015:8).

Penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa usaha kecil atau pelaku usaha kecil dalam ekonomi kerakyatan apabila berkembang dengan baik akan memberikan kontribusi yang besar bagi negara dalam pertumbuhan ekonomi. Indonesia yang memiliki tenaga usia produktif sebesar 134 juta warga kelas menengah bisa menjadi keunggulan absolut apabila 134 juta warga kelas menengah tersebut menjadi pelaku usaha kecil, karena usaha barang dan jasa dengan keunggulan biaya dan tenaga kerja besar dan murah, bisa menggerakkan sektor

perekonomian yang muara akhirnya menopang pertumbuhan ekonomi negara.

KEWIRAUSAHAAN

Kewirausahaan merupakan proses sikap mental dan jiwa aktif, kreatif, inovatif, serta jiwa dan kemampuan untuk mencari sesuatu yang baru, berbeda, bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain untuk menjadi kaya. Sedangkan orang yang melakukan disebut wirausaha atau wirausahawan, dalam mencapai tujuan yang diinginkannya seorang wirausahawan memiliki ciri dan watak (Meredith, 2000:5);

- Beriman dan taqwa pada Alla SWT
- Percaya diri
- Berorientasikan tugas dan hasil
- Sosial
- Berani mengambil risiko
- Mempunyai jiwa pemimpin
- Keorisinilan
- Berorientasi ke masa depan

Selain memiliki ciri-ciri tersebut diatas seorang wirausaha juga memiliki sifat sifat sebagai berikut:

- Yakin dan mandiri serta selalu optimis
- Berprestasi
- Suka bekerja keras dan berorientasi pada laba
- Semangat tinggi dan memiliki inisiatif.
- Menyukai tantangan.
- Mudah bergaul dengan orang lain serta ramah
- Tidak mudah marah dan suka terhadap saran dan kritik yang membangun.
- Memiliki inovasi dan kreativitas tinggi.
- Memiliki jaringan bisnis yang luas.
- Mempunyai visi pada masa depan.

Secara langsung baik internal maupun eksternal keberadaan seorang wirausaha berperan dalam perekonomian nasional. Secara internal peran seorang wirausaha dalam mengurangi tingkat kebergantungan hidupnya dalam mencari penghasilan dan bekerja terhadap orang lain, meningkatkan kepercayaan diri, serta meningkatkan daya beli pelakunya. Seorang wirausaha secara eksternal juga

berperan, dalam menyediakan lapangan kerja bagi para pencari kerja. Terserapnya tenaga kerja oleh kesempatan kerja yang disediakan oleh seorang wirausaha, tingkat pengangguran secara nasional menjadi berkurang. Tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan dalam bentuk ekonomi kerakyatan yang bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat kecil, meski usaha kecil tapi banyak dan besar secara nasional dalam suatu negara sudah tentu akan bisa mengurangi jumlah pengangguran yang besar.

Keberadaan kewirausahaan dalam usaha ekonomi kerakyatan dan terserapnya pengangguran akan berdampak pada naiknya pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat, secara pelan tapi pasti perekonomian akan bergerak dan tumbuh. Berkembangnya kewirausahaan meskipun usaha-usaha kecil dalam ekonomi kerakyatan akan mendorong tumbuhnya perekonomian secara nasional. Tumbuhnya perekonomian nasional, dan berkurangnya pengangguran secara tidak langsung tentunya akan menekan tumbuhnya tingkat kriminalitas yang biasanya di picu oleh tingginya tingkat pengangguran

Berdasarkan hal tersebut diatas peran wirausaha dalam perekonomian negara sangat besar:

- Menekan jumlah pengangguran
- Mampu dalam penciptaan lapangan kerja untuk diri sendiri dan orang lain
- Meningkatkan pendapatan masyarakat
- Menggerakkan perekonomian nasional
- Mengombinasikan faktor-faktor produksi (alam, tenaga kerja, modal dan keahlian)
- Meningkatkan produktivitas nasional
- Mencari peluang yang ada di dalam negeri untuk di olah sendiri

EKONOMI KERAKYATAN

Ekonomi kerakyatan seperti dalam pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah system perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi meliputi:

- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan

- Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan
- Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Negara mempunyai peran yang sangat besar dan penting dalam ekonomi kerakyatan dengan tujuan untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran perseorangan serta produksi tidak dikuasai perorangan. Saat ini 99,9% pelaku ekonomi di Indonesia adalah rakyat dan masuk dalam skala usaha mikro, kecil dan menengah (pangsa pasar 20%), dan sisanya 0,1 % pelaku ekonomi lainnya adalah usaha besar dan konglomerat (Pangsa pasar 80%) (Syamsuri, 2013).

Sistem ekonomi kerakyatan saat ini mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai system nilai bangsa Indonesia yang tujuannya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan salah satu unsure intrinsiknya adalah ekonomi Pancasila (Mubyarto: 2002) dalam Hendrayani (2012) dengan nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- Ketuhanan, dimana “roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral”.
- Kemanusiaan, yaitu:” kemerdekaan sosial, yaitu ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan kemerdekaan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial”.
- Kepentingan nasional (Nasionalisme Ekonomi), di mana “nasionalisme ekonomi; bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya

Saat ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila sebagai dasar negara sangat diperlukan, karena disadari atau tidak apabila suatu bangsa tanpa memiliki suatu dasar negara yang kuat sulit suatu bangsa untuk dapat bertahan dalam menghadapi berbagai

perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri”.

- Kepentingan rakyat banyak (demokrasi ekonomi):”demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat.
- Keadilan sosial, yaitu:”keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggung jawab, menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PANCASILA

Kata Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta dari buku “Sutasoma” hasil karya Mpu Tantular dari masa kerajaan Majapahit, buku tersebut berisi tentang Panca = lima, sila = aturan atau tatanan yang berisi nilai-nilai yang berkembang dari budaya, adat istiadat, nilai-nilai keagamaan pada saat itu dan aturan atau perilaku yang harus dilakukan seseorang. Artinya nilai-nilai Pancasila telah ada dan berasal dari adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai religious yang berkembang dari bangsa Indonesia sejak dulu. Pancasila telah melalui proses yang lama sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Kemudian nilai-nilai pancasila digali dan diangkat serta dirumuskan kembali secara musyawarah dan mufakat oleh para pendiri negara sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia yang pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan sebagai landasan dasar negara Republik Indonesia dan tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dilambangkan dengan burung Garuda dengan membawa perisai berisi lima sila serta berbagai makna yang terkandung didalamnya .

tantangan dan ancaman. Gerakan reformasi tahun 1998 telah berupaya mengembalikan peran dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia melalui Ketetapan Sidang Istimewa MPR No. XVIII/MPR/1998. Setelah melalui kajian secara ilmiah dan

objektif tentang peran pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dirumuskan kembali dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 45 butir Pancasila sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia dalam mengamalkannya yang tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai berikut:

Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-

bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila ketiga: Persatuan Indonesia

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.

5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial

Nilai-nilai dalam Pancasila tersebut di atas sebagai kajian ilmiah yang dilakukan dan diarahkan pada pengembangan kewirausahaan yang dijiwai oleh nilai-nilai dalam Pancasila tersebut. Sehingga pada generasi mendatang akan tumbuh seorang wirausaha yang berkarakter dan berjiwa Pancasila dalam melakukan usahanya. Berkembangnya kewirausahaan pancasila akan mendorong wirausaha-wirausaha baru yang sehat dan bermartabat untuk tumbuh sesuai dengan budaya dan adat istiadat yang berkembang di Indonesia sebagai ekonomi kerakyatan yang berciri khas Indonesia. Bukan wirausaha yang mengarah pada tumbuhnya usaha yang semata-mata sendiri atau liberalisasi atau apapun juga.

Kewirausahaan Pancasila yang ditumbuhkan oleh wirausaha-wirausaha Pancasila yang tumbuh dalam ekonomi kerakyatan yang berciri khas Indonesia, diharapkan akan bisa tumbuh dengan cepat karena sesuai dengan budaya, adat istiadat dan karakter lokal, bangsa Indonesia. Kecepatan pertumbuhan wirausaha tentunya akan bisa dan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia, selain itu juga pertumbuhan perekonomian Indonesia yang dibangun atas ekonomi kerakyatan terbukti mampu bertahan saat terjadi krisis ekonomi tahun 1998.

KEWIRAUSAHAAN PANCASILA

Pertama, KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kewirausahaan berdasarkan ketuhanan yang maha esa artinya bahwa sebagai seorang wirausaha harus beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa karena semua usaha yang dilakukannya tak lepas karena ridho NYA. Wirausaha harus mau bekerja keras dan jujur serta percaya bahwa usaha yang dikembangkan adalah berkat Allah SWT dan merupakan kesempatan yang diberikan Tuhan bagi wirausaha, supaya dapat melayani sesama manusia dengan penciptaan lapangan kerja bagi orang lain. Selain itu juga kesempatan untuk berbakti pada nusa dan bangsa. Wirausaha dalam melakukan usaha harus benar-benar menghormati, membangun dan menjunjung tinggi tentang kerukunan agama dan kebebasan beragama, wirausaha juga wajib memberikan informasi yang benar tentang ke halalan produknya. Wirausaha tidak boleh bertindak diskriminatif atas perbedaan agama.

Kedua, KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

Kewirausahaan yang didasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab didasarkan pada peradaban manusia yang menganjurkan dengan semakin tingginya peradaban manusia akan mendorong wirausaha untuk selalu mengembangkan inovasi dan kreativitas yang semakin baik dalam kehidupan manusia. Sebagai Wirausaha juga dituntut untuk selalu memiliki kepribadian, perasaan, kehormatan, harga diri, keinginan untuk selalu meraih prestasi yang setinggi-tingginya

Ketiga, PERSATUAN INDONESIA

Kewirausahaan yang didasarkan pada persatuan Indonesia, menunjukkan bahwa setiap warga negara / wirausaha berhak melakukan usaha diseluruh wilayah tanah air Indonesia tanpa diskriminasi atas suku, warna kulit, jenis kelamin, tempat lahir, agama, golongan atau aliran politik. Wirausaha harus sama-sama membangun kebersamaan dalam usahanya, meningkatkan rasa cinta tanah air dan masyarakat, serta meningkatkan kepentingan

negara dan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Wirausaha dalam melakukan usahanya harus menghindari usaha-usaha yang bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat bangsa dan negara.

Keempat, KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAD KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN

Kewirausahaan yang didasarkan pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti bahwa dalam kewirausahaan seorang wirausaha bebas memilih usahanya. Dalam melakukan usahanya perlu mendengar saran dan keluhan para konsumennya untuk pengembangan produknya menjadi lebih baik. Wirausaha harus membuka diri dan ramah untuk berdialog dan mengutamakan permusyawaratan dalam membuat keputusan usahanya bagi kepentingan bersama

Kelima, KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Kewirausahaan yang didasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti wirausaha bebas memilih jenis usaha yang dilakukannya dan harus diperlakukan secara adil dalam melakukan usaha dan memperlakukan adil juga pada semua konsumennya secara bersama-sama untuk meningkatkan hasil usahanya supaya dapat meningkatkan kesejahteraan wirausaha, pekerjaanya dan keluarganya. Wirausaha menerima imbalan sesuai dengan fungsi, kemampuan dan kontribusinya pada peningkatan usahanya.

PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN PANCASILA

Pendidikan Kewirausahaan Pancasila bertujuan untuk membentuk manusia secara utuh yang memiliki, pemahaman dan keterampilan berwirausaha yang didasarkan pada nilai-nilai dalam butir-butir dari kelima sila Pancasila. Pendidikan Kewirausahaan Pancasila dapat diimplementasikan secara

terpadu dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah. Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan Pancasila dapat dilaksanakan dan melibatkan; kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik secara bersama. Penerapan Pendidikan kewirausahaan Pancasila ke dalam kurikulum dilakukan dengan cara mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan di sekolah yang dapat direalisasi/diwujudkan melalui pendidikan kewirausahaan pancasila dan direalisasikan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari

Selain itu pendidikan kewirausahaan pancasila di sekolah dapat diinternalisasikan melalui berbagai aspek, antara lain:

1. Pendidikan Kewirausahaan Pancasila Terintegrasi Dalam Seluruh Mata Pelajaran

Pendidikan kewirausahaan Pancasila terintegrasi dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran adalah penginternalisasian nilai-nilai kewirausahaan pancasila ke dalam pembelajaran sehingga hasilnya diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kewirausahaan pancasila, terbentuknya karakter wirausaha pancasila dan pembiasaan nilai-nilai kewirausahaan pancasila ditaanamkan ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui metode dan proses pembelajaran baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran maupun melalui system penilaian. Cara ini dilakukan agar peserta didik mengenal dan memahami nilai-nilai kewirausahaan pancasila dan menjadikannya sebagai perilaku sehari-hari.

2. Pendidikan Kewirausahaan Pancasila Terpadu Dalam Kegiatan Ekstra Kurikuler

Kegiatan Ekstra Kurikuler kewirausahaan Pancasila merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran yang dilakukan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka. Melalui Pendidikan Kewirausahaan Pancasila Terpadu Dalam Kegiatan Ekstra Kurikuler diharapkan akan berkembangnya potensi, bakat dan minat secara optimal, serta tumbuhnya kemandirian dan kebahagiaan peserta didik yang berguna untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sebagai

manusia peserta didik dapat berapresiasi secara bebas tanpa ada ikatan

3. Pendidikan Kewirausahaan Pancasila Melalui Pengembangan Diri

Pengembangan diri dilakukan melalui pendidikan kewirausahaan Pancasila dilakukan dalam bentuk kegiatan pengembangan kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik yang didasarkan dari nilai-nilai dalam butir-butir Pancasila. Pengembangan diri yang dikembangkan dengan memperhatikan nilai-nilai dalam butir-butir Pancasila diharapkan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari guna menunjang pendidikan peserta didik dalam mengembangkan: bakat, minat, kreativitas, kompetensi, dan kebiasaan dalam kehidupan, kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir, kemampuan pemecahan masalah, dan kemandirian. Pengembangan diri melalui Pendidikan Kewirausahaan Pancasila dapat dilakukan melalui pengintegrasian kedalam kegiatan sehari-hari sekolah.

4. Perubahan Pelaksanaan Pembelajaran Kewirausahaan Pancasila dari Teori ke Praktik

Pembelajaran kewirausahaan Pancasila diarahkan pada pencapaian tiga kompetensi yang meliputi penanaman karakter wirausaha pancasila, pemahaman konsep dan skill, dengan bobot yang lebih besar pada pencapaian kompetensi jiwa dan skill dibandingkan dengan pemahaman konsep. Kompetensi Dasar yang terkait langsung dengan pengembangan pendidikan kewirausahaan pancasila, diajarkan melalui mata pelajaran yang secara langsung (eksplisit) mengenalkan nilai-nilai kewirausahaan pancasila, dan sampai taraf tertentu menjadikan peserta didik peduli dan menginternalisasi nilai-nilai dalam butir-butir pancasila. Contoh pembelajaran kewirausahaan pancasila yang mampu menumbuhkan karakter dan perilaku wirausaha pancasila dilakukan dengan cara mendirikan berdo'a sebelum menjalankan usaha, menjual produk halal,

berlaku jujur dan memberikan informasi yang benar tentang produk, dan lain-lain.

5. Pengintegrasian Pendidikan Kewirausahaan Pancasila ke dalam Bahan/Buku Ajar

Bahan/buku ajar sebagai komponen pembelajaran yang paling berpengaruh perlu dirancang untuk menginternalisasi peserta didik dengan nilai-nilai butir pancasila dalam kewirausahaan dan dapat dilakukan ke dalam bahan ajar baik dalam pemaparan materi, tugas maupun evaluasi terhadap apa yang sesungguhnya terjadi pada proses pembelajaran.

6. Pengintegrasian Pendidikan Kewirausahaan Pancasila melalui Kultur Sekolah

Pengembangan nilai-nilai dalam pendidikan kewirausahaan Pancasila dalam budaya sekolah mencakup semua kegiatan yang dilakukan di sekolah oleh semua komponen kehidupan di sekolah. (peserta didik, guru, pegawai administrasi dan kelompok masyarakat di sekitar sekolah) yang merupakan suasana/atmosfir yang menggambarkan interaksi semua komponen kehidupan di sekolah.

7. Pengintegrasian Pendidikan Kewirausahaan Pancasila melalui Muatan Lokal

Muatan lokal merupakan mata pelajaran yang memuat karakteristik budaya lokal, keterampilan, nilai-nilai luhur budaya setempat dan mengangkat permasalahan sosial dan lingkungan sekitar sesuai dengan nilai-nilai butir dalam Pancasila. Dalam Pengintegrasian Pendidikan Kewirausahaan Pancasila melalui muatan local diharapkan peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya sesuai dengan peluang yang ada dalam lingkungan sekitar kehidupannya. Sehingga akan memudahkan peserta didik mengembangkan keterampilannya sebagai bekal kehidupan, karena semua sumber dan bahan ada di sekitar lingkungan kehidupan peserta didik. Contoh; anak pantai yang tinggal dekat lokasi wisata pantai mempunyai peluang usaha yang bisa dilakukan dengan memberi nilai tambah pada

ikan menjadi ikan bakar (barang setengah jadi), sehingga akan memudahkan pembeli sebagai buah tangan karena tidak berbau amis dan juga halal, yang kemudian dijual di lokasi objek wisata, diharapkan kegiatan peserta didik mampu menjual ikan bakar ke depannya dapat sebagai sumber pendapatan dikenal dengan pengembangan kewirausahaan dengan mengangkat kearifan lokal.

Pembahasan

Kewirausahaan Pancasila merupakan suatu system kewirausahaan yang didasarkan pada kelima sila dalam Pancasila secara bulat dan utuh. Hal ini merupakan pelaksanaan murni dari UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila. Ini juga merupakan perwujudan Pancasila dan UUD 1945 di lingkungan kewirausahaan dalam bentuk keamana dan ketenangan berusaha.

Sesuai UUD 1945, perekonomian Indonesia disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dimana unit-unit usaha dan perekonomian yang dilakukan boleh dilakukan oleh siapapun juga warga negara Indonesia, artinya system pemilikan dalam berwirausaha dalam menangkap peluang usaha bisa dilakukan oleh wirausaha pancasila tanpa ada batasan tertentu. Tentunya sebagai seorang wirausaha pancasila Indonesia dalam usahanya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa karena semua kelancaran usaha dan rezeki itu ada karena ALLAh SWT, selain itu juga harus bertanggungjawab mengutamakan kesejahteraan masyarakat umum diatas kesejahteraan individu. Wirausaha pancasila dalam mengembangkan jaringan usahanya harus bijaksana karena melibatkan semua masyarakat dan dipupuk rasa tanggungjawab bersama atas usahanya sehingga setiap pihak yang berkepentingan memperoleh hasil yang sesuai dengan usaha masing-masing ada rasa keadilan, karena tidak saling menginjak atau menghancurkan antara usaha satu dengan lainnya.

Sesuai dengan prinsip kewirausahaan Pancasila, maka wirausaha pancasila juga turut serta dalam upaya penciptaan lapangan kerja

bagi pekerjaanya harus mempunyai sikap social yang mencerminkan ketuhanan, kemanusiaan dan kerjasama, kesatuan, sukarela, toleransi, rasa saling menghormati, keterbukaan, rasa saling tolong menolong demi keberlangsungan usaha yang dikembangkan.

Pelaksanaan kewirausahaan Pancasila yang di laksanakan sesuai dengan butir-butir

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya jumlah pengangguran sebagai akibat pelambatan perekonomian Indonesia mempunyai dampak cukup besar bagi tumbuhnya perekonomian negara. Peran pemerintah sebagai regulator saat ini sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk dapat mendorong tumbuhnya perekonomian, salah satunya dengan memberi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan memberi kesempatan pada ekonomi kerakyatan yang sudah terbukti mampu bertahan dari krisis untuk bisa mandiri. Dengan harapan bisa lebih mandiri dan berkembang, dan bisa mengurangi pengangguran. Namun di sisi yang lain kebijakan tersebut tidak di imbangi dengan peningkatan macam, kualitas, dan jenis usaha yang dikembangkan oleh masyarakat. Sebenarnya hal itu bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mengangkat kewirausahaan yang didasarkan dan dikembangkan dari nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang telah diangkat dalam nilai-nilai butir yang ada dalam Pancasila. Karena dipandang hal tersebut sesuai dengan karakter akar sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat Indonesia menjadi Kewirausahaan Pancasila:

1. Kewirausahaan Pancasila yakin bahwa usaha yang dilakukan karena atas Ridho Allah SWT, dan setiap langkah usaha harus diyakini dengan doa kepada Allah SWT
2. Kewirausahaan Pancasila dalam melakukan usahanya selalu menghormati sesama

pancasila akan mendorong tumbuhnya usaha-usaha yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Bergeraknya perekonomian akan berdampak pada naiknya pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat, meskipun pelan tapi pasti untuk mendorong tumbuhnya perekonomian secara nasional dan mengurangi pengangguran dan kriminalitas.

manusia dan menghormati hak asasi manusia dan tanpa melakukan diskriminasi

3. Kewirausahaan Pancasila dalam melakukan usahanya bisa dilakukan diseluruh tanah air Indonesia dengan melibatkan seluruh komponen bangsa
4. Kewirausahaan Pancasila dalam melakukan usahanya rakyat bisa melakukannya, dimanapun juga tanpa ada pilih kasih atau perbedaan
5. Kewirausahaan Pancasila dalam melakukan usahanya harus adil, jujur serta membantu orang lain

Dalam realisasinya pengembangan Kewirausahaan Pancasila dapat di implementasikan dengan melakukan pendidikan Kewirausahaan Pancasila pada masyarakat. Melalui Pendidikan Kewirausahaan Pancasila, pendidikan kewirausahaan yang sesuai dengan karakter akar sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat Indonesia akan bisa lebih mudah dipahami dan berkembang karena sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat Indonesia. Berkembangnya Kewirausahaan Pancasila akan mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang tangguh, karena didukung karakter lingkungan yang sesuai dengan masyarakat atau biasa dikenal dengan kearifan lokal karena semuanya bersumber dari lingkungan sekitar tempat tinggal masyarakat. Tumbuh dan berkembangnya wirausaha pancasila akan mendorong terbukanya lapangan kerja baru dan bisa menyerap tenaga kerja dan bisa mengurangi pengangguran. Pada gilirannya akan mampu menggerakkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, sehingga akan

mendorong tumbuhnya perekonomian negara yang tangguh dan maju karena didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa serta atas ridho Allah SWT.

Saran

Pengembangan pendidikan Kewirausahaan Pancasila dapat dilakukan pada semua tingkatan pendidikan baik secara formal maupun non formal. Pendidikan kewirausahaan Pancasila yang dilakukan melalui pendidikan formal dapat diberikan sejak mulai tingkatan pendidikan anak usia dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA dan SMK), Perguruan Tinggi (PT). sedangkan untuk pendidikan non formal bisa dilakukan dengan pengabdian masyarakat secara langsung

kepada masyarakat dengan melibatkan semua komponen masyarakat yang ada termasuk Perguruan Tinggi. Sehingga keberadaan Kewirausahaan Pancasila segera menyebar keseluruh masyarakat dan bisa segera di implementasikan dalam kegiatan perekonomian. Agar perekonomian segera tumbuh dan mampu bergerak serta mampu menyerap tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran yang dampaknya bisa meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan bisa membelanjakan uangnya. Dengan begitu perekonomian negara akan tumbuh kuat karena didukung oleh semua masyarakat melalui ekonomi kerakyatan yang kuat dan tangguh karena semua masyarakat Indonesia bergerak secara bersama meskipun kecil-kecil tapi besar, karena jumlah penduduk Indonesia sangat besar dan merupakan pasar yang potensial.

DAFTAR RUJUKAN

- Hendro. 2011. *Dasar-Dasar Kewirausahaan. Panduan bagi Mahasiswa untuk Mengenal, Memahami, dan Memasuki Dunia Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Diposkan oleh [Heni Hendrayani](http://henihendrayani.blogspot.com/.../peranan-ekonomi-ke...) di 02.51. henihendrayani.blogspot.com/.../peranan-ekonomi-ke...[Translate this page](#)
Apr 12, 2012 - *Ekonomi kerakyatan (Demokrasi ekonomi) adalah sistem ekonomi ... ekonomi Pancasila yang moralistik, demokratik, dan mandiri, sangat...* (online)
<http://henihendrayani.blogspot.co.id/2012/04/peranan-ekonomi-kerakyatan-sebagai.html>
- Kodrat, David S, Wina Christina, 2015, *Entrepreneurship, sebuah Ilmu*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Meredith, G Geoffrey, et al, 2000, *Kewirausahaan: Teori dan Praktek*, Seri Manajemen Strategis no.1, Cet. 6, CV Teruna GrafikaPT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Pusat Kurikulum Balitbang Kemendiknas. 2010. *Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan; Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa*. Jakarta.
- Roda Dua,10 juli 2014, 45 butir-butir pedoman pengamalan pancasila terbaru Roda2blog.com/2014/07/10/45-butir-butir-pedoman-pengamalan-pancasila-terbaru/ diakses 8 November 2015.
- Syamsuri, Slamet (2013), *Upaya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal*, (online), <https://www.facebook.com/permalink.php?id...>[Translate this page](#)

https://m.facebook.com/permalink.php?id=149644278538222&story_fbid=152442208258429 diakses 8 November 2015

Wordpres. 2011. *Konsep Kewirausahaan Dan Pendidikan Kewirausahaan*. (Online),

(<http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2011/06/29/konsep-kewirausahaan-dan-pendidikan-kewirausahaan/>), diakses 8 Mei 2012.